

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai Landasan Suatu Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Kepegawaian

Bagus Fatkhul Alam¹, Bagoes Soenarjanto, Anggraeny Puspaningtyas³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

bagusfatkhul1205@gmail.com¹, bagoes87@untag-sby.ac.id², anggraenypuspa@untag-sby.ac.id³

Abstract

The Human Resources Development Agency of East Java Province (BPSDM), through the ISO 9001:2015 External Quality Audit (AME) tries to apply the GCG Principles in Improving the quality of personnel. GCG has principles that must be applied, namely transparency, accountability, independence, fairness and responsibility. This research is a descriptive study with a qualitative approach with 2 research focuses, namely (1) how to apply good corporate governance to improving the quality of staff at the Human Resources Development Agency (BPSDM) of East Java Province; (2) What are the inhibiting factors faced by the Human Resources Development Agency (BPSDM) of East Java Province in improving the quality of personnel by applying the principles of Good Corporate Governance. This research uses descriptive qualitative research, data obtained through observation, interviews, documentation in the field. The results of this study indicate that the application of GCG principles is still not implemented optimally and becomes an obstacle in improving the quality of staffing at the East Java BPSDM so that it needs continuous improvement to be more optimal. This can be proven by the absence of transparency data in improving the quality of personnel. while employee performance indicators related to improving work quality, quantity, timing, effectiveness and independence at work have changed for the better.

Keywords: *Good Corporate Governance, Quality, Indicators Of Performance.*

Abstrak

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur (BPSDM), melalui Audit Mutu Eksternal (AME) ISO 9001:2015 mencoba menerapkan Prinsip-Prinsip GCG dalam Meningkatkan mutu kepegawaian. GCG memiliki prinsip yang harus diterapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, kemadirian, kewajaran dan tanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 2 fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance terhadap peningkatan mutu kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur; (2) Apa saja Faktor Penghambat yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu kepegawaian dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG masih belum terlaksana secara optimal dan menjadi hambatan dalam peningkatan mutu kepegawaian di BPSDM Jawa Timur sehingga perlu penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya data transparansi dalam peningkatan mutu kepegawaian. sedangkan indikator kinerja pegawai terkait peningkatan kualitas kerja, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas dan kemandirian dalam bekerja mengalami perubahan menjadi semakin baik.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Mutu, Indikator Kinerja

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan salah satu penduduk terbanyak di dunia, populasi penduduk yang banyak juga dibarengi dengan masalah masyarakat yang kompleks. Demi mewujudkan pelayanan dan kinerja pemerintahan yang baik Indonesia telah menerapkan berbagai macam sistem tata kelola yang baik mulai dari reformasi birokrasi yang baik hingga *Good Governance* sebagai salah dua upaya pemerintah untuk menjadikan kinerja aparatur yang baik namun Menurut data yang diambil oleh Populi Center pada tahun 2021, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Populi Center telah melakukan survei terhadap masalah pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah pelayanan berbelit yang menduduki keluhan tertinggi yaitu sebanyak 11,4%, kemudian disusul dengan permasalahan pelayanan dengan jumlah skor 11,3% responden mengutarakan

Bahwa pelayanan pada sektor publik masih mengalami kendala di dalam batas waktu yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya menjadi prosedur pelayanan publik, kemudian terdapat 9,7% masyarakat atau dalam hal ini yaitu responden yang mempermasalahkan transparansi dalam pelayanan publik sehingga masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh ASN masih kurang ramah.

Isu mengenai *Good Corporate Governance* awalnya hanya berlaku untuk peningkatan mutu dan kualitas sebuah perusahaan-perusahaan pada sektor privat atau swasta saja, yang digunakan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi stabil bagi perusahaan tersebut. Namun seiring berjalanya waktu dimana tuntutan jaman semakin cepat dan pragmatis dimana banyak sekali tuntutan oleh masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan organisasi publik maka penerapan-penerapan dan nilai dari sektor privat mulai dikembangkan, Menurut Newel & Wilson (2002) praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai organisasi, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko dalam pembuatan keputusan yang salah, dan meningkatkan rasa percaya investor. Namun Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kekurangan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* hal itu dapat dibuktikan dengan posisi Indonesia yang cenderung buruk dalam penerapan prinsip dibandingkan negara-negara tetangga. Menurut Azhar Maksum dengan judul Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia (2005) singapura memiliki indeks 8,93, Malaysia 7,72, Thailand 4,89 dan terakhir yakni Indonesia dengan indeks *corporate governance* 2,28.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. Melalui website resminya <https://bpsdm.jatimprov.go.id/> mencoba menerapkan prinsip baru berupa kegiatan dengan judul “Tingkatkan Manajemen Mutu Guna Wujudkan Good Corporate Governance, BPSDM Jatim adakan Audit Mutu Eksternal (AME) ISO 9001:2015” tujuan dari kegiatan ini adalah guna meningkatkan manajemen mutu dan kualitas layanan untuk mewujudkan Good Corporate Governance, BPSDM Jatim Bekerjasama dengan IKRCS melaksanakan kegiatan Surveillance External/ Audit Mutu Eksternal (AME) ISO 9001:2015, (21/02/2022). ISO 9001:2015 yaitu sebuah standart dalam manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang berisikan terkait dengan syarat-syarat yang harus di lakukan secara konkrit oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan quality management yang semakin baik, ISO 9001:2015 dijalankan sebagai pedoman sebuah organisasi agar dapat melakukan evaluasi apakah bentuk layanan dan proses layanan yang

dilakukan oleh organisasi tersebut dapat memenuhi keinginan / persyaratan dari penerima layanan secara konsisten (Admin, 2022b).

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia (Jojok Dwiridotjahjono 2009), Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Sektor Publik (Dhimas Puguh Nugroho 2013), Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik (Dian Kemala 2013), Implementasi Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Peningkatan Kinerja BUMN (Sintya Al Fataah 2019), Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi) (siswidiyanto 2013). Kemudian teori yang digunakan sebagai analisis di pembahasan menggunakan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* (KNKG 2006) dan Mutu Kepegawaian menggunakan Indikator Kinerja (Robbins : 2006). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu kepegawaian dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu kepegawaian dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan tempo waktu Cross sectional (dalam satu waktu). Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif, akan tetapi internal dan subjektif yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan tes, angket maupun eksperimen. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur (BPSDM). Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada semester genap 2021/2022 Penelitian ini juga akan mendeskripsikan peningkatan mutu kinerja pegawai melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance. sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 tahap dari Miles, Huberman dan Saldana yaitu : Pengumpulan data, Kondensasi Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan mutu kepegawaian. Sebagai berikut:

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* :

- a. Tranparansi, tranparansi telah dilaksanakan oleh BPSDM sebagai salah satu prinsip GCG yang dapat dari kemampuan untuk memberikan akses keterbukaan data dan informasi secara akurat padat, cepat dan mudah diakses Melalui website. Visi, Misi tujuan organisasi, susunan pegawai Namun terdapat kendala pada penerapan prinsip secara individu pegawainya
- b. Akuntabilitas, BPSDM telah menerapkan akuntabilitas yang meliputi: Pembagian tugas dilakukan secara rinci, departemenisasi atau pembagian tugas antar pegawai juga telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari SAKIP

- d. Kemandirian, Dari hasil penelitian dan data yang didapatkan BPSDM telah mampu menerapkan Prinsip-prinsip kemandirian yaitu: Menghindari tekanan dari pihak manapun dan menghindari sikap subjektivitas. Hal ini dapat dilihat dari sistem aduan ke BKD dan Laporan aduan Internal
- e. Kewajaran, BPSDM telah mampu memperlakukan semua pegawai secara adil, setara dan perlakuan yang humanis, Organisasi memberikan pelayanan yang setara tanpa adanya ikatan personal.
- f. Responsibilitas, responsibility ini diwujudkan dalam bentuk pelaporan pada setiap bidang telah memperoleh capaian target mereka tidak kurang dari 100% oleh karena itu BPSDM telah mampu menerapkan responsibilitas.

Indikator Kinerja (Mutu Kepegawaian)

- a. Kualitas Kinerja, peningkatan kualitas kinerja yang dirasakan oleh pegawai dari penerapan GCG Penerapan terkait keterbukaan dan transparansi lebih memudahkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kualitas kinerja juga ikut bertambah terhadap kinerja masing-masing.
- b. Kuantitas Kinerja, Dengan adanya GCG kuantitas kerja pada pegawai juga telah bertambah karena jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan juga akan berpengaruh terhadap laporan capaian yang berada pada Sakip dan SKP sebagai bentuk kuantitas kinerja pegawai.
- c. Ketetapan waktu, Peningkatan ketetapan kinerja setelah di terapknya GCG memberi dampak terhadap ketetapan waktu pegawai. hal ini dapat dilihat dari nilai SKP pegawai yang bertambah.
- d. Efektivitas, Efektivitas setelah adanya penerapan GCG bisa dirasakan melalui digitalisasi yang dilakukan pada BPSDM Jawa Timur dimana baik pada Tata usaha dan Bidang Manajerial keduanya memanfaatkan sarana teknologi digital sebgai perangkat untuk menompang efektivitas kinerja mereka.
- e. Kemandirian, peneraparan Prinsip GCG pada BPSDM telah meningkatkan kemandirian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan untuk semakin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dan tidak perlu diawasi seteiap saat adalah sebagai bukti bahwa seorang pegawai telah menerapkan kemandirian.

Tabel 1 Penilaian Mutu Pegawai

No.	Nama Informan	Penilaian Mutu Melalui SKP	
		Sebelum GCG (2020)	Sesudah GCG (2021)
1.	Lia Pratiwi Oktavia	92 (baik)	94,32 (sangat baik)
2.	Ratnasari	92,74 (sangat baik)	93,3 (sangat baik)

Sumber : Olahan Peneliti Dari SKP Pegawai (2020-2021)

Dari data yang diperoleh peneliti setelah diterapknya prinsip *Good Corporate Governance* pada BPSDM Jawa Timur, prinsip ini terbukti dapat berpengaruh pada peningkatan mutu kepegawaian. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian dilapangan dimana dari dua orang pegawai sebagai informan mengalami peningkatan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan mutu kepegawaian:

- a. Sebagaimana pegawai kurang memahami prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik
- b. Penerapan prinsip transparansi masih menjadi hambatan karena berhubungan dengan etika pegawai yang sulit diawasi oleh BPSDM Jawa Timur.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Sebagai landasan Suatu Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Jawa Timur) masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan salah satu prinsip Transparansi masih menjadi hambatan di dalam peningkatan mutu kepegawaian dan belum diterapkan secara maksimal, kemudian pemahaman konsep dari prinsip *Good Corporate Governance* yang masih rendah. Maka dari itu diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal.
2. Adapun Faktor Penghambat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:
 - 1) Sebagian pegawai kurang memahami konsep penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. artinya tidak semua pegawai memahami atau menerima sosialisasi yang baik terhadap penerapan prinsip
 - 2) Penerapan Transparansi yang sulit diterapkan oleh masing-masing pegawai karena masih dianggap sebagai tuntutan dan tidak dimaknai sebagai kewajiban atau kebiasaan, selain itu masih sulit untuk dilakukan pengawasan terhadap prinsip transparansi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas, terdapat beberapa saran:

1. Sosialisasi yang berkelanjutan secara menyeluruh terkait penerapan penerpan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam peningkatan mutu kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
2. Diberlakukannya pelaksanaan audit internal terkait tranparansi yang menjadi masalah pada penerapan Prinsip GCG, dengan adanya audit ynag berkala susuai aturan dan standart yang baik maka peningkatan tranparansi akan menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Basuki, K. (2019). Pengertian Organisasi Publik. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Dwiridotjahjono, J. (2009) *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*. Universitas Katholik Parahiyangan.
- Fataah, S. Al. (n.d.). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BUMN*. Universitas Brawijaya.
- Ferlinda, E. D., Ribawanto, H., & Siswidiyanto. (2019). Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 22–30.
- Kemala, D., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik (Taufeni Taufik & Dian Kemala). *Pekbis Jurnal*, Vol.5, No., 51–63.
- Nugroho, D. P. (2013). Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Sektor Publik. *Jurnal Mahasiwa Unesa*, 01.
- RENSTRA 2019-2024 BPSDM. (n.d.). BPSDM Jawa Timur. <http://bpsdm.jatimprov.go.id/>